



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN,
BPJS KETENAGAKERJAAN, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: RDP dan RDPU
Dengan	: 1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI;
	2. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung RI;
	3. Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN;
	4. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
	5. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
	6. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
	7. Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
	8. Direktur Utama BPJS Kesehatan;
	9. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan;
	10. Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero);
	11. Direktur Utama PT. Petro Kimia Gresik (Persero);
	12. Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines;
	13. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero);
	14. Direktur Utama PT. Gas Negara (Persero);
	15. Direktur Utama PT. Kertas Leces (Persero);
	16. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero);
	17. Direktur Utama PT. Indo Farma Tbk (Persero);
	18. Direktur Utama PT. Kimia Farma Tbk (Persero);
	19. Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
	20. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry;
	21. Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero);
	22. Direktur Utama PT. BNI (Persero);
	23. Direktur Utama PT. BRI (Persero);
	24. GEBER BUMN.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 8 September 2014
Pukul	: 10.00 WIB – selesai

- Acara : Memberikan *Legal Opinion* terkait penyelesaian Permasalahan Pekerja Outsourcing di Perusahaan BUMN
- Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Hadir : A. Anggota Komisi IX DPR RI
orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI
- B. Pengarah dan Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN beserta jajaran;
- C. Gerakan Bersama (GEBER) Buruh/Pekerja di BUMN.
- D. 20 (duapuluh) Direksi PT di lingkungan BUMN.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung RI, Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN, Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero); Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan; Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero), Direktur Utama PT. Petro Kimia Gresik (Persero), Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines, Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero), Direktur Utama PT. Gas Negara (Persero), Direktur Utama PT. Kertas Leces (Persero), Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Indo Farma Tbk (Persero), Direktur Utama PT. Kimia Farma Tbk (Persero), Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry;; Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Direktur Utama PT. BNI (Persero), Direktur Utama PT. BRI (Persero), dan GEBER BUMN, dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta Satgas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing BUMN untuk segera menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di Perusahaan BUMN, baik yang sedang berjalan, maupun yang belum diselesaikan.
2. Pendapat hukum (*legal opinion*) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI menyatakan bahwa:

- a. Amanat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dilaksanakan karena merupakan perintah undang-undang termasuk frasa "demi hukum".
 - b. Bahwa dalam hal pengangkatan pekerja tanpa pelaksanaan seleksi. Dikarenakan pelaksanaan seleksi didasari oleh peraturan internal perusahaan dalam bentuk SK Direksi, maka perubahan dari seleksi menjadi tidak seleksi harus dilakukan terlebih dahulu penyesuaian SK Direksi tersebut.
 - c. Bahwa untuk tertib hukum dan adanya kepastian hukum dalam melakukan perubahan SK Direksi kiranya Kementerian BUMN baik selaku regulator dan RUPS (organ tertinggi) dapat menerbitkan peraturan Menteri BUMN yang menjadi acuan dalam melaksanakan perubahan SK Direksi dalam seleksi pegawai yang akan dirubah.
 - d. Bahwa selama bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara dan pelaksanaan amanat undang-undang bukan merupakan tindak pidana.
3. Komisi IX DPR RI, Satgas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing Perusahaan BUMN, Jamdatun Kejaksaan Agung RI, Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Direksi-Direksi BUMN dan Geber BUMN sepakat bahwa:
- a. Dalam proses perubahan status hubungan kerja dari outsourcing menjadi pekerja tetap di masing-masing perusahaan BUMN dilakukan tanpa seleksi.
 - b. Pengangkatan pekerja outsourcing pada point a dilakukan secara bertahap dimulai paling lambat pada tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 sesuai data-data pekerja Satgas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing BUMN.
 - c. Jamdatun Kejaksaan RI akan memberikan pendapat hukum secara tertulis.
 - d. Dalam melaksanakan kesepakatan diatas, Direksi-direksi BUMN akan meminta *legal opinion* tanggal 9 September 2014. Jamdatun Kejaksaan Agung RI akan memberikan *legal opinion* paling lambat 10 September 2014.
4. Komisi IX DPR RI meminta pengawas ketenagakerjaan Kemenakertrans RI untuk mengeluarkan nota pemeriksaan terhadap perusahaan :
- a. PT. POS Indonesia, Tbk.
 - b. PT. Telkom Indonesia, Tbk.
 - c. PT. Pertamina (PERSERO).
 - d. PT. Pupuk Kaltim.

Rapat diakhiri pukul 16.10 WIB

KETUA RAPAT,


dr. RIBKA TJIPTANING